

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH  
MENURUT HUKUM NASIONAL**

(Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**ERWIN KUSUMA HARYADI**  
**C100110085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH  
MENURUT HUKUM NASIONAL**

(Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ERWIN KUSUMA HARYADI**  
**C100110085**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Mutimatun Ni/ami, S.H, M.Hum.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH MENURUT HUKUM NASIONAL

(Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)

Oleh:

**ERWIN KUSUMA HARYADI**  
**C100110085**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 5 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

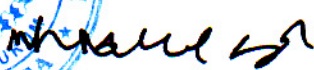
Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()



Dekan,

  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Maret 2018

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a horizontal line that ends in a small hook.

(Erwin Kusuma Haryadi)  
C100110085

## **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH MENURUT HUKUM NASIONAL (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses dan syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan perbandingan Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/ PA.Klt dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder yakni sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan data primer dari wawancara. Metode pengumpulan dengan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 210 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam, antara lain yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*). Keputusan menurut Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perbuatan almh. Ny. Sutyem menghibahkan seluruh tanah pekarangan SHM No. 38 dan tanah tegalan SHM No. 39 kepada Tergugat Andi Sugiyanto adalah bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian hibah tersebut batal menurut hukum atau dapat dibatalkan. Sedangkan pada Hukum Adat juga mengenal hibah dengan tujuan si penerima hibah berkewajiban untuk memelihara dan merawat si penghibah terutama jika sedang menderita sakit, ketuaan dan lain sebagainya. Penghibahan dapat dibatalkan jika si penerima hibah tidak melakukan kewajibannya tersebut.

**Kata kunci:** pembatalan hibah, Kompilasi Hukum Islam, hukum adat

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the process and terms of grants according to Compilation of Islamic Law and comparison of Decision Number 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt with Compilation of Islamic Law and Customary Law. Research method through normative juridical approach which is descriptive. Source of data derived from secondary data that is source of primary and secondary law, while primary data from interview. Methods of collection with literature studies and field studies through interviews, and then analyzed qualitatively. The results show that the process and terms of grant according to Compilation of Islamic Law set forth in Articles 210 to 214 Compilation of Islamic Law, among others that can do a grant is a person who at least has a 21-year-old and sensible without any coercion from others to grant as much as one-third of his property to another person or institution and must be witnessed by two witnesses, and not forgetting the granted property must be the property of the donor (*wahab*). Decision by Compilation of Islamic Law stated that almh acts. Mrs. Sutyem grants the entire land of SHM. 38 and land No. of SHM land. 39 to Defendant Andi Sugiyanto is contrary to Article 210 paragraph (1) Compilation of Islamic Law, thus the grant is null and void or can be canceled. While the Customary Law also recognizes grants with the purpose of the grantee is obliged to maintain and care for the grantee especially if suffering from illness, aging and so forth. The grant can be canceled if the grantee does not perform the obligation.

**Keywords:** grant cancellation, Compilation of Islamic Law, customary law

## 1. PENDAHULUAN

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka kriteria hibah adalah: (1) Suatu pemberian; (2) Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma; (3) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup; (4) Tidak dapat ditarik kembali; (5) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.<sup>2</sup>

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdara pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu: (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam

---

<sup>1</sup>Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup>Abdul Ghafur Anshari, 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 174

kemiskinan; (4) Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.<sup>3</sup>

Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.<sup>4</sup>

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Seperti halnya di dalam putusan perkara Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt yang mana pada awal mulanya orang tua dari penggugat dan tergugat meninggalkan harta warisan berupa: (1) Tanah pekarangan persil : 99 ptk.3 kls.II luas 2335 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: (a) Utara: Trimo Wiyono; (b) Selatan: Wiryo; (c) Barat: Sakimin, (d) Timur : Wiryosupi; (2) Tanah Tegalan persil: 93a ptk.66 kls.IV luas 5675 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: (a) Utara: Sungai; (b) Selatan: Sungai; (c) Barat: Martodriyo dan Sudiman; (d) Timur: Kartodiryo; (3) Dan semuanya terletak di Ds. Mundu, Kec.Tulung, Kab.Klaten, (tertulis dalam buku C No.80 Desa Mundu) yang kemudian untuk pekarangan persil: 99 ptk.3 kls.II luas 2335

---

<sup>3</sup>R. Subekti, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal. 440

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 440

m<sup>2</sup> telah dikonversi menjadi SHM No.38 dan persil:93a ptk.66 kls.IV luas 5675 m<sup>2</sup> menjadi SHM No.39 atas nama Ny. Sutyem istri Jantomiharjo (Akta Hibah No.74 dan 75 Tahun 1977), yang mana dari semua harta warisan tersebut pada awal mulanya adalah milik Karsodikromo dan istrinya Ngadinah, yang dihibahkan langsung kepada Ny. Sutyem anak dari Martodiryo (anak dari Karsodikromo). Selanjutnya dalam pernikahannya Ny. Sutyem istri Jantomiharjo tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Andi Sugiyanto anak dari pasangan suami istri Bp. Martodikromo dan Ny.Leginem dengan akta pengangkatan anak Nomor: 34 tanggal 19 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidayat, SH notaris di Klaten. Kemudian setelah itu Ny. Sutyem menghibahkan semua harta hibahnya kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto dengan Akta Hibah Nomor: 1128/HIB/X/2007 dan Akta Hibah Nomor: 1129/HIB/X/2007 tanggal 26-10-2007 yang dibuat oleh Ananto Kumoro SH selaku PPAT dan sekaligus diatas namakan Andi Sugiyanto.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Ny. Sutyem dalam menghibahkan seluruh harta hibah yang dimilikinya kepada anak angkatnya yang bernama Andi Sugiyanto tersebut merugikan salah satu ahli waris yang sah yaitu anak dari Ny. Karyodimejo yang bernama Narto Narto Wiratno yang dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu sama-sama cucu dari Karsodikromo. Maka perbuatan pemberian hibah yang dilakukan oleh Ny. Sutyem kepada Andi Sugiyanto selaku anak angkatnya juga telah melanggar pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *“bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*. Dan dalam penghibahan tersebut Ny. Sutyem memberikan hibah tanpa sepengetahuan orang tua dari Narto yang bernama Ny. Karyodimejo yang mana kedudukannya sebagai anak dari Karsodikromo.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang disengketakan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 552 K/Sip/1970 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 237/1969 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 10/1964 ”Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa perkara hibah



yang menurut hukum agama islam adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama (Yurisprudensi Tahun 1970)".

Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat. Terlepas dari hal tersebut tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar kepastian akan suatu yang dibuktikan. Khususnya tujuan membuktikan secara yuridis adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan alat-alat bukti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui proses dan syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan perbandingan putusan nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi: (1) Manfaat teoritis, dapat memberikan masukan pemikiran baik itu berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup studi hukum dan masyarakat; (2) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan hakim pada khususnya, dalam pelaksanaan pembatalan hibah di Kota Klaten.

## **2. METODE**

Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder yakni sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan data primer dari wawancara. Metode pengumpulan dengan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses dan Syarat Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Proses hibah tertuang di dalam Pasal 210 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*).

Untuk hibah yang sudah diberikan kepada penghibah secara sah tidak dapat diminta atau ditarik kembali oleh si penghibah, kecuali hibah tersebut dilakukan antara orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI). Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri dapat pula diperhitungkan sebagai harta warisan (Pasal 211 KHI).

Selanjutnya di dalam Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia yang berada di luar negeri atau negara lain dapat melakukan hibah dengan cara membuat surat akta hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isi dari akta hibah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan; (2) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya; (3) Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama oleh pemberi hibah; (4) Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.<sup>5</sup>

Hibah juga memiliki beberapa syarat dan ketentuan atau sering dikenal dengan syarat dan rukun hibah yang harus dipenuhi oleh penghibah maupun yang mendapatkan hibah, antara lain sebagai berikut: (1) Syarat-syarat bagi penghibah:

---

<sup>5</sup>Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, 1997. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, lihat Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 117.

(a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain; (b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan; (c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal); (d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah; (2) Syarat-syarat bagi penerima hibah adalah setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan dapat ditambahkan disini, anak-anak atau mereka yang berada dibawah kuratele (pengampuan) dapat menerima hibah melalui kuasa (wali)nya.

Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah (2009:480), mengatakan orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan. Dalam Hukum Islam hibah menjadi sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yakni: ijab, qabul, dan qabda.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan, yang berkaitan dengan benda hibah sebagai berikut: (1) Benda tersebut benar-benar ada; (2) Benda tersebut mempunyai nilai; (3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan; (4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.<sup>7</sup>

### **3.2 Perbandingan Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat**

#### **3.2.1 Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, proses hibah, tertuang di dalam Pasal 210 sampai dengan 214. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*).

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, 2009. *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hal. 480.

<sup>7</sup>Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal.115-115 Lihat pula Helmi Karim, 1993. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.76-78.

pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan putusan tersebut diatas dapat kita lihat bahwa hakim didalam pertimbangan hukumnya merujuk kepada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan kedua orang saksi untuk dimiliki”*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka batas maksimal hibah yang dapat di terima oleh Tergugat adalah 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah yang dalam hal ini adalah almh. Ny. Sutyem.

Dalam gugatan penggugat dijelaskan bahwa tergugat telah menerima hibah secara keseluruhan dari harta almh. Ny. Sutyem yang berupa tanah pekarangan SHM No. 38 dan tanah tegalan SHM No. 39 dimana hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum batal menurut hukum atau dapat dibatalkan.

Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pertimbangan hukum yang dinyatakan oleh majelis hakim yang berbunyi: *“Menimbang, bahwa oleh sebab itu perbuatan almh. Ny. Sutyem menghibahkan seluruh tanah pekarangan SHM No. 38 dan tanah tegalan SHM No. 39 kepada Tergugat Andi Sugiyanto adalah bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam”*; *“Menimbang, bahwa dengan demikian hibah tanah SHM No. 38 dan SHM.No. 39 dari almh. Ny. Sutyem terhadap Tergugat Andi Sugiyanto adalah batal menurut hukum atau dapat dibatalkan”*

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui di dalam Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tersebut Majelis hakim dalam memberikan putusan dan pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan ketentuan hibah yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain bahwa tuntutan Penggugat di dalam gugatannya sesuai dengan peraturan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sudah seharusnya apabila majelis hakim memberi putusan sesuai ketentuan pasal tersebut.

---

<sup>8</sup>[www.e-jurnal.com/2016/03/analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya.html](http://www.e-jurnal.com/2016/03/analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya.html) diunduh Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 19:02

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan.

Hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Dari ketentuan-ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas masalah hukum yang berkaitan dengan hibah dan kewarisan dan pembatalannya.<sup>9</sup>

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: (1) *jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; (2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; (3) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.*<sup>10</sup>

Sementara itu, dalam hal syarat yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Sedangkan dalam hal syarat yang ke dua dan ketiga, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan. Semua pemindahtanganan, penghipotekan dan pembebanan yang

---

<sup>9</sup>Azni, 2015. Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 Juli - Agustus 2015.

<sup>10</sup>Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Drs. Aziz Nur Eva, Panitera Pengadilan Agama Klaten, suatu hibah dapat dibatalkan apabila: (1) Penerima hibah tidak pantas menerima hibah (durhaka, nakal); (2) Penerima hibah tidak mau menerima hibah; dan (3) Penerima hibah menelantarkan barang hibah.<sup>11</sup>

Mengenai sebab-sebab suatu hibah dapat dibatalkan, Ibu Drs. Aziz Nur Eva menjelaskan bahwa penyebab suatu hibah dapat dibatalkan adalah sebagai berikut: (1) Karena barang yang dihibahkan melebihi batas maksimum pemberian hibah yaitu 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah; (2) Karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah; dan (3) Penerima hibah menjadi tidak cakap hukum.<sup>12</sup>

### **3.2.2 Menurut Hukum Adat**

Pada dasarnya hukum adat mengatur tentang penarikan kembali atau pembatalan hibah yang telah diberikan, apabila hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini terdapat beberapa daerah yang membolehkan penarikan kembali hibah.<sup>13</sup>

Masyarakat adat Jawa Barat terutama di Desa Leuwi Leang dan Citeureup, suatu hibah dapat ditarik kembali apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum adat dan Hukum Islam. Sebaliknya di daerah Cianjur, Banjar, Ciamis, dan Cikenong, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun utama pewaris tidak dapat terlunasi dari kekayaan yang ditinggalkannya. Demikian pula di daerah Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Kecamatan Karawang dan Indramayu apabila hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan pembatalan hibah menurut hukum adat ada beberapa daerah tertentu yang tidak dapat ditarik kembali dan ada yang dapat ditarik kembali apabila hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Aziz Nur Eva, Panitera Pengadilan Agama Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 16 Januari 2018, pukul 10.30 WIB.

<sup>12</sup> Aziz Nur Eva, Panitera Pengadilan Agama Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 16 Januari 2018, pukul 10.30 WIB.

<sup>13</sup> Azni, Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No.2 Juli - Agustus 2015.

<sup>14</sup> Eman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hal. 63.

Pada seluruh lingkungan hukum adat yang ada di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris kepada anak-anaknya dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekcoakan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, namun begitu tidak jarang terjadi juga pembagian harta waris tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal dunia. Selain itu ada juga di antara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.<sup>15</sup>

Objek sengketa dalam kasus ini merupakan harta warisan atau harta *gawan* atau harta asal dari alm. Karsodikromo yang pada tanggal 20 Juli 1977 oleh Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem telah dihibahkan kepada Ny. Sutyem istri Jantomiharjo (Akta Hibah No.74/1977 dan Akta Hibah No.75/1977). Ny. Sutyem istri Jantomiharjo mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Andi Sugiyanto (Tergugat) anak dari pasangan suami istri Bp. Martodikromo dan Ny. Leginem dengan akta pengangkatan anak Nomor: 34 tanggal 19 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidayah, SH notaris di Klaten.

Objek sengketa tersebut oleh Ny. Sutyem istri dari Jantomiharjo, telah memberikan seluruh hartanya kepada Tergugat (anak angkat) dengan Akta Hibah Nomor: 1128/Hib/X/2007 dan Akta Hibah Nomor: 1129/HIB/X/2007 tanggal 26-10-2007 yang dibuat oleh Ananto Kumoro, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam kasus ini Narto Narto Wiratno (Penggugat) dan Ny. Sutyem mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai cucu dari alm. Karsodikromo sehingga keduanya sama-sama memiliki hak atas warisan dari kakeknya yaitu alm. Karsodikromo.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 79

Mengenai masalah ini dalam hal ini hukum adat Jawa tidak mengaturnya. Hukum adat yang mengatur ketentuan demikian adalah hukum adat matrilineal karena dalam hukum adat ini seorang anak, terutama anak laki-laki tidak menerima warisan dari mamaknya. Hal ini dikarenakan pewarisan dalam sistem ini dari orang tua perempuan kepada anaknya yang perempuan saja, sehingga untuk memberikan hak waris kepada anak laki-lakinya perlu diadakan hibah wasiat tersebut. Apabila kita bandingkan dengan ketentuan pembatalan hibah dalam hukum perdata KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Dapat dilihat bahwa pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan mengingat keadaan tertentu, suatu hibah itu dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya.

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya, menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.<sup>16</sup>

Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972, Nomor. 827 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa suatu hibah hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat. Oleh karena itu Mahkamah Agung telah memutuskan demikian maka putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam melakukan putusan terhadap kasus serupa yang setelah putusan tersebut.<sup>17</sup>

Dalam pemberian hibah yang diberikan oleh Ny. Sutyem kepada anak angkatnya yang bernama Andi Sugiyanto (Tergugat) terdapat suatu kekhilafan dimana Ny. Sutyem menghibahkan semua harta peninggalan yang ia terima kepada anak angkatnya sedangkan Narto Narto Wiratno (Penggugat) juga memiliki hak yang sama dengan Ny. Sutyem atas obyek sengketa sehingga pemberian hibah oleh Ny. Sutyem kepada Tergugat dapat untuk dibatalkan.

---

<sup>16</sup> [www.academia.edu/22776747/Batalnya\\_hibah.html](http://www.academia.edu/22776747/Batalnya_hibah.html) diunduh Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 21.03

<sup>17</sup> Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972, Nomor. 827 K/Sip/1971



## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

*Pertama*, proses dan syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Proses hibah tertuang pada Pasal 210 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam, antara lain yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*). Hibah yang sudah diberikan kepada penghibah secara sah tidak dapat diminta atau ditarik kembali oleh si penghibah, kecuali hibah tersebut dilakukan antara orang tua kepada anaknya. Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri dapat pula diperhitungkan sebagai harta warisan.

Pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan; (2) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah salam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya; (3) Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama oleh pemberi hibah; (4) Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.

*Kedua*, perbandingan Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat, yaitu: (1) Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Ny. Sutyem istri Jantomiharjo tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Andi Sugiyanto (Tergugat) anak dari pasangan suami istri Bp. Martodikromo dan Ny. Leginem dengan akta pengangkatan anak Nomor: 34 tanggal 19 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidayat, SH notaris di Klaten. Selanjutnya objek sengketa tersebut oleh Ny. Sutyem istri Janto Miharjo, telah dihibahkan semuanya kepada Tergugat (anak angkat) dengan Akta Hibah Nomor: 1128/Hib/X/2007 dan Akta Hibah Nomor: 1129/HIB/X/2007 tanggal 26-10-2007 yang dibuat oleh Ananto Kumoro, SH selaku PPAT, sehingga perbuatan tersebut merugikan Penggugat dan sudah

selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan. Dikarenakan objek sengketa tersebut adalah harta warisan *gawan* yang berasal dari almarhum Karsodikromo (kakek dari Ny. Sutyem), yang mana Ny. Sutyem dan Penggugat dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu sama-sama cucu dari alm. Karsodikromo, maka perbuatan pemberian hibah yang dilakukan oleh Ny. Sutyem kepada Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan telah melanggar Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Karena hibah tersebut melebihi 1/3 bagian dan telah merugikan ahli waris yang lain (Penggugat), maka sudah selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan.

Sedangkan, (2) Menurut hukum adat yang ada di Indonesia, proses pewarisan harta seorang pewaris kepada anak-anaknya dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekcoakan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, namun begitu tidak jarang terjadi juga pembagian harta waris tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal dunia. Selain itu ada juga di antara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, bagi Pemerintah, sebaiknya membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah karena dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama telah memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai ketentuan praktik hibah.

*Kedua*, bagi Hakim, ketika menangani kasus pembatalan hibah sebaiknya dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan pengaturan tentang kewarisan dalam hukum Islam karena meskipun diatur dalam pasal atau aturan yang berbeda tetapi antara hibah dan waris keduanya saling berkaitan.

*Ketiga*, bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan tentang akibat konflik hibah hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik yakni musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu, kemudian baru mencari solusi ke pengadilan apabila terjadi kebuntuan dalam memecahkan masalah tersebut.

## **PERSANTUNAN**

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tak dapat dibalas dengan apapun. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.4, Jakarta: Akamedika Pressindo
- Anshari, Abdul Ghafur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, 1997. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, lihat Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Subekti, R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

### **Jurnal/Karya Ilmiah/Website**

- Azni, 2015. Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 Juli - Agustus 2015.
- [www.e-jurnal.com/2016/03/analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya.html](http://www.e-jurnal.com/2016/03/analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya.html) diunduh Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 19:02
- [www.academia.edu/22776747/Batalnya\\_hibah.html](http://www.academia.edu/22776747/Batalnya_hibah.html) diunduh Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 21.03

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972, Nomor. 827 K/Sip/1971